



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SULUTTENGOMALUT

DJKN

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN -
WILAYAH (UAPPA-W)
TAHUN ANGGARAN
2025
(AUDITED)



KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sumarsono

NIP 197205141999031010



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
Lampiran	
VI. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) SAKTI-SPAN	69
A. BAR SAKTI-SPAN Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	70
B. BAR SAKTI-SPAN KPKNL Manado	71
C. BAR SAKTI-SPAN KPKNL Gorontalo	72
D. BAR SAKTI-SPAN KPKNL Palu	73
E. BAR SAKTI-SPAN KPKNL Ternate	74
VII. Laporan Keuangan Utama	
A. Laporan LRA UAPPA-W Komparatif	76
B. Laporan Neraca UAPPA-W Komparatif	78
C. Laporan Neraca Percobaan Kas UAPPA-W	80
D. Laporan Neraca Percobaan Akrua UAPPA-W	82
E. Laporan LO UAPPA-W	84
F. Laporan LPE UAPPA-W	86
VIII. Laporan Keuangan Tambahan	
A. Laporan LRA Pendapatan Akun UAPPA-W	88
B. Laporan LRA Pendapatan Organisasi Akun UAPPA-W	89
C. Laporan LRA Pendapatan Organisasi UAPPA-W	92
D. Laporan LRA Belanja Akun UAPPA-W	93
E. Laporan LRA Belanja Organisasi Akun UAPPA-W	95
F. Laporan LRA Belanja Organisasi UAPPA-W	97
G. Laporan LRA Sumber Dana Progam/Kegiatan UAPPA-W	98
H. Laporan LRA Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun UAPPA-W	100
I. Laporan Neraca Percobaan Saldo Awal Akrua UAPPA-W	102
IX. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Utama	
A. Laporan BMN Intrakomptabel Subsubkelompok UAPPA-W	104
B. Laporan BMN Ekstrakomptabel Subsubkelompok UAPPA-W	110

C. Laporan BMN Gabungan Subsubkelompok UAPPA-W	111
D. Laporan KDP Subkelompok UAPPA-W	118
E. Laporan ATB Subkelompok UAPPA-W	119
F. Laporan BMN Penyusutan Intrakomptabel Subsubkelompok UAPPA-W	120
G. Laporan BMN Penyusutan Ekstrakomptabel Subsubkelompok UAPPA-W	125
H. Laporan BMN Amortisasi Subsubkelompok UAPPA-W	126
I. Laporan Posisi BMN di Neraca UAPPA-W	127
J. Laporan Posisi BMN di Neraca Saldo Awal UAPPA-W	128
 X. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tambahan	
A. Laporan CRBMN UAPPA-W	130
B. Laporan CRBMN Menurut Jenis Transaksi UAPPA-W	140
C. Laporan Persediaan UAPPA-W	164
 XI. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 Per Satuan Kerja	
A. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (537979)	166
B. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 KPKNL Manado (537983)	343
C. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 KPKNL Gorontalo (538023)	381
D. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 KPKNL Palu (538002)	392
E. LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025 KPKNL Ternate (538113)	403
 XII. LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025 Per Satuan Kerja	
A. LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Juni 2025 KPKNL Manado (537983)	410
B. LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Juni 2025 KPKNL Gorontalo (538023)	522
C. LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Juni 2025 KPKNL Palu (538002)	605
D. LPJ Bendahara Penerimaan Bulan Juni 2025 KPKNL Ternate (538113)	737
 XIII. Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) per Satuan Kerja	
A. Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) KPKNL Manado (537983)	788
B. Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) KPKNL Gorontalo (538023)	793
C. Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) KPKNL Palu (538002)	795
D. Laporan Posisi Saldo Kas (LPSK) KPKNL Ternate (538113)	797
 XIV. Lampiran Lain-lain	
A. Memo Penyesuaian	799
B. Nota Dinas Revisi Anggaran TA 2025	836
C. Capaian Rincian Output Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	1155
D. Capaian Rincian Output KPKNL Manado	1160
E. Capaian Rincian Output KPKNL Gorontalo	1164
F. Capaian Rincian Output KPKNL Palu	1168
G. Capaian Rincian Output KPKNL Ternate	1172
 XV. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan	1176

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO LANTAI 5 JALAN BETHESDA NOMOR 6-8, KOTA MANADO
TELEPON: (0431) 851522, 853127, LAMAN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomaltu>,
POS-EL: kanwildjkn.manado@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sumarsono

NIP 197205141999031010



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp22.890.734.078,00 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp23.958.194.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp15.975.859.439,00 atau mencapai 69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp23.236.594.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp122.204.583.803,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp725.393.329,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp121.479.190.474,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp409.947.664,00 dan Rp121.794.636.139,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.849.020.568,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.495.042.483,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.353.978.085,00. Surplus Kegiatan Nonoperasional sebesar Rp110.682.950,00 dan Pos-Pos Luar Biasa tidak ada realisasi sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp10.464.661.035,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp116.770.214.219,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp10.464.661.035,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.431.174,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai (Rp5.441.670.289,00) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp121.794.636.139,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 DESEMBER 2025				31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
Pendapatan						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	23.958.194.000	22.890.734.078	(1.067.459.922)	96	20.866.528.397
Jumlah Pendapatan		23.958.194.000	22.890.734.078	(1.067.459.922)	96	20.866.528.397
Belanja						
Belanja Negara						
Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	0	0
Belanja Barang	B.3	11.574.504.000	9.694.093.955	(1.880.410.045)	84	11.069.862.985
Belanja Modal	B.4	11.662.090.000	6.281.765.484	(5.380.324.516)	54	11.987.947.957
Jumlah Belanja		23.236.594.000	15.975.859.439	(7.260.734.561)	97	23.057.810.942

Manado, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sumarsono

NIP 197205141999031010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
NERACA**

PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	19.081.530	12.782.492
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	387.179.853	736.309.832
Belanja Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.3	98.666.667	109.673.333
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.4	116.993.825	24.799.290
Persediaan	C.1.5	103.471.454	166.761.407
Jumlah Aset Lancar		725.393.329	1.050.326.354
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	79.409.060.629	78.006.560.629
Peralatan dan Mesin	C.2.2	23.877.552.106	22.569.475.905
Gedung dan Bangunan	C.2.3	42.802.136.699	39.277.711.947
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	209.936.000	209.936.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	4.899.950	11.830.950
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(24.824.394.910)	(23.569.339.444)
Jumlah Aset Tetap		121.479.190.474	116.506.175.987
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-lain	C.3.2	0	515.145.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	0	(515.145.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		122.204.583.803	117.556.502.341

Uraian	Cat.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	390.935.164	784.898.705
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	19.012.500	1.389.417
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		409.947.664	786.288.122
Jumlah Kewajiban		409.947.664	786.288.122
Ekuitas			
Ekuitas	C.5	121.794.636.139	116.770.214.219
Jumlah Ekuitas		121.794.636.139	116.770.214.219
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		122.204.583.803	117.556.502.341

Manado, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sumarsono

NIP 197205141999031010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	22.849.020.568	20.702.547.225
Jumlah Pendapatan		22.849.020.568	20.702.547.225
Beban			
Beban Persediaan	D.2	313.371.015	372.879.504
Beban Barang dan Jasa	D.3	4.844.684.087	5.256.702.873
Beban Pemeliharaan	D.4	2.167.591.771	2.061.714.162
Beban Perjalanan Dinas	D.5	2.439.457.581	3.308.432.649
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	D.6	2.729.938.029	2.705.955.753
Jumlah Beban		12.495.042.483	13.705.684.941
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		10.353.978.085	6.996.862.284
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		110.682.950	184.499.391
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		122.584.000	186.076.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		11.901.050	1.576.609
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Uraian	Cat.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	D.7	110.682.950	184.499.391
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		10.464.661.035	7.181.361.675
Pos Luar Biasa	D.8	0	0
Surplus/Defisit-LO		10.464.661.035	7.181.361.675

Manado, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sumarsono
NIP 197205141999031010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN
31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	116.770.214.219	107.277.527.856
Surplus/Defisit LO	E.2	10.464.661.035	7.181.361.675
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	0	0
Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas	E.4	1.431.174	26.329.643
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	1.431.150	26.329.643
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	24	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	(5.441.670.289)	2.284.995.045
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		5.024.421.920	9.492.686.363
Ekuitas Akhir	E.6	121.794.636.139	116.770.214.219

Manado, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sumarsono
NIP 197205141999031010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, dengan lingkup wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ada 4 (empat) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibawah wilayah kerja Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yaitu KPKNL Manado, KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, dan KPKNL Ternate.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus berupaya melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan BUMN walaupun sejak berlakunya PP 33 tahun 2006, piutang negara yang berasal dari BUMN pengurusannya tidak lagi diserahkan pada PUPN/DJKN. Dalam hal pelayanan lelang, terus diupayakan penggalan potensi lelang eksekusi maupun non eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana transaksi jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Secara umum tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

1. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan
2. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi - strategi yang harus ditempuh, yaitu:

1. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
 - 1.1. Menatausahakan kekayaan negara dan mendorong terbentuknya data base kekayaan negara yang akurat dan akuntabel
 - 1.2. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
 - 1.3. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran;
 - 1.4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara dan penilaian;
 - 1.5. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset-aset *idle*;
 - 1.6. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara dan penilaian;
 - 1.7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; dan
 - 1.8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Penilaian.
2. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.
 - 2.1 Menatausahakan piutang negara dan lelang yang akuntabel dan mendorong terbentuknya *data base* piutang negara dan lelang yang akurat;
 - 2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang;
 - 2.3 Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
 - 2.4 Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;

- 2.5 Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang; dan
- 2.6 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang.

A.1.1. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sampai dengan periode Tahunan 2025 adalah 116,39, dengan rincian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

Kode SS IKU	Sasaran Strategis IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	100,00	105,29	105,29
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	126,48%	120,00%
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100,00%	116,78%	116,78%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	102,15%	102,15%
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100,00%	216,30%	120,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	99,01	120,00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	108,34	120,00
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70,00	87,78	120,00

Kode SS IKU	Sasaran Strategis IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks
Internal Process Perspective (25%)				
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100,00%	139,52%	120,00%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	118,75%	118,75%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	123,36%	120,00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70,00%	109,08%	120,00%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	118,67%	120,00%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	125,22	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,0%	100,00%	120,00%

Kode SS IKU	Sasaran Strategis IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks
Learning & Growth Perspective (25%)				
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,59	120,00
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	120,78	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	96,22	120,00
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	114,72	114,72
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,39

Kode	BU	Polemik	VO	Target R/C	Realisasi R/C	Selisih R/C	Selisih Persen (%)	Rendahnya Capaian (%)	Rendahnya Pers. (%)	Nilai Satuan Strength	Total Penguatan	
				Target R/C	Realisasi R/C							
Eksternal Process Perspective (25%)												
1										120.00	194.90	
1a-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan tidak terduga	Max	N/L	100.00%	105.23%	12.90%	57.50%	105.23%	105.23%	60.62		
1b-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	117.80%	14.90%	43.40%	117.80%	117.80%	60.62		
Customer Perspective (20%)												
2										104.00	513.70	
2a-CP	Tingkat ketepatan waktu kedatangan di lokasi	Max	N/L	100.00%	123.34%	12.90%	35.50%	123.34%	123.34%	43.65		
2b-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja	Max	N/L	100.00%	93.78%	10.90%	36.90%	93.78%	93.78%	50.34		
2c-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	205.20%	14.90%	22.90%	205.20%	120.90%	32.11		
2d-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	123.34%	12.90%	35.50%	123.34%	123.34%	43.65		
3	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	123.34%	12.90%	35.50%	123.34%	123.34%	43.65	513.70	
3a-M	Indeks kepuasan pelanggan	Max	N/M	77.00	90.00	14.90%	59.00%	123.34%	123.34%	60.62		
3b-CP	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi	Max	N/M	74.00	86.00	14.90%	59.00%	123.34%	123.34%	60.62		
Internal Process Perspective (25%)												
4										120.00	513.70	
4a-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
4b-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
5	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		513.70
5a-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
5b-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
6	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62	513.70	
6a-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
6b-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
6c-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
6d-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
Learning and Growth Perspective (25%)												
7										120.00	513.70	
7a-CP	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
7b-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
7c-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
7d-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
8	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62	513.70	
8a-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
8b-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
8c-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
9	Presensi dan ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62	513.70	
9a-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
9b-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		
9c-M	Indeks ketepatan waktu kerja di lokasi yang tercatat di aplikasi dan terduga	Max	N/M	100.00%	105.23%	14.90%	10.00%	105.23%	105.23%	60.62		

REKAPITULASI ORGANISASI
JENJANG PANG
TAHUN 2025

Kode	RUJ	Pencapaian	WC	Target s.d		Nilai Tercapai RUJ	Tertarik RUJ	Indeks Capaian RUJ	Indeks Max. 100	Nilai Sesuai Strategi	Nilai Perspective	
				Tahunan IV	Tahunan IV							
Strategi dan Perspective (20%)												
1	Pengelolaan keuangan negara dan insang yang prospektif, efektif, dan transparan										111,30	111,30
1a-CF	Indeks integritas	Max	PL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
1b-CF	Perencanaan realisasi/pemerintah negara dan pengelolaan keuangan negara dan insang	Max	PL	100,00%	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
Customer Perspective (20%)												
2	Pengelolaan keuangan negara dan insang yang optimal										112,26	112,26
2a-CF	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
2b-CF	Perencanaan realisasi/pelayanan insang	Max	PL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
2c-CF	Perencanaan realisasi/pemerintah dan badan pusat negara	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	112,26	
Employee Perspective (20%)												
3	Pelayanan keuangan negara dan insang yang efektif, efisien, dan transparan										113,71	113,71
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
3b-CF	Indeks efektivitas pelayanan dan transaksi	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
Internal Process Perspective (20%)												
4	Pengelolaan keuangan negara dan insang yang efektif										113,71	113,71
4a-CF	Perencanaan keuangan negara dan insang yang efektif	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
4b-CF	Perencanaan evaluasi kinerja keuangan	Max	PL	100,00%	101,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
Learning and Growth Perspective (20%)												
5	Pelayanan keuangan negara, pemerintah, dan insang yang profesional dan produktif										113,71	113,71
5a-CF	Perencanaan realisasi/pengelolaan Sistem Kerja/Pelayanan	Max	PL	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
5b-CF	Tingkat kualitas pelayanan pemerintah	Max	PL	70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
5c-CF	Perencanaan produktivitas insang	Max	PL	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	113,71	
Learning and Growth Perspective (20%)												
6	Pengelolaan keuangan negara dan insang yang efektif, efisien, dan transparan										113,71	113,71
6a-CF	Indeks kualitas layanan pemerintah	Max	PL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
6b-N	Indeks rata-rata pengelolaan keuangan negara dan insang	Max	PL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
6c-N	Perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah	Max	PL	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	113,71	
Learning and Growth Perspective (20%)												
7	Pengelolaan keuangan negara dan insang yang efektif										113,71	113,71
7a-CF	Indeks pengelolaan pemerintahan keuangan	Max	PL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
7b-N	Indeks pengelolaan layanan keuangan publik (PPK)	Max	PL	80,00	113,71	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
Learning and Growth Perspective (20%)												
8	Pengelolaan dan pengembangan insang, serta manajemen risiko yang efektif										113,71	113,71
8a-N	Indeks kualitas manajemen keuangan negara dan insang	Max	PL	80,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
8b-N	Indeks capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan negara dan insang	Max	PL	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00		
Nilai												113,71

REKAPITULASI KINERJA ORGANISASI
KYNOL Ternate
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Pelaksanaan	WIC	Tetapan s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimbang (IKU)	Indeks Capaian (IKU)	Indeks Max. 128	Nilai Sesuai Strategis	Nilai Perspective
Strategik: Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan barang yang produktif, adaptif, dan terpercaya	-								111,93	
1a-CP	Indeks integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,54%	105,28	105,29	60,52	111,93
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan barang	Max	P/W	100,00%	132,76%	14,00%	42,42%	132,75	120,00	50,91	
Customer: Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan barang yang optimal	-								102,38	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	122,82%	19,00%	36,54%	122,82	120,00	43,85	
2b-CP	Persentase realisasi pajak barang	Max	P/L	100,00%	71,70%	19,00%	36,54%	71,70	71,70	29,23	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/W	100,00%	153,64%	14,00%	26,92%	153,64	120,00	32,31	111,19
3	Pelayanan kekayaan negara dan barang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/W	74,00	85,57	14,00%	50,30%	126,14	120,00	60,00	
3b-RI	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/W	77,00	85,22	14,00%	50,30%	127,54	120,00	60,00	
Internal Process: Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								120,88	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang dibertaklakan	Max	P/W	100,00%	124,88%	14,00%	50,30%	124,88	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/W	100,00%	120,92%	14,00%	50,30%	120,92	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penarikan, dan barang yang profesional dan produktif	-								120,00	120,00
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/W	100%	300,33%	14,00%	33,33%	300,00	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/W	70,00%	112,88%	14,00%	33,33%	158,37	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas barang	Max	P/W	80,00%	125,33%	14,00%	33,33%	151,54	120,00	40,00	
Learning and Growth: Perspective (20%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/W	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-RI	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/W	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-RI	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/W	80,00%	97,52%	14,00%	33,33%	121,50	120,00	40,00	
7	Penerapan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								116,22	116,74
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/W	100,00	119,42	14,00%	50,30%	119,42	119,42	59,22	
7b-RI	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (IPID)	Max	P/W	80,00	111,20	14,00%	50,30%	136,08	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	
8a-RI	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/W	80,00	87,73	14,00%	100,00%	122,15	120,00	120,00	
NKO											116,83

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL GORONTALO
Periode s.d. Desember 2025

Kode	ISI	Persentase	W/S	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Desember	Bobot (BU)	Bobot Tertimbang (BU)	Indeks Capaian (BU)	Indeks Max. 120	Indeks Scored (Indeks)	Nilai Penguatan
	Strategis Perspective (20%)									Y	
1	Pengelolaan keuangan negara dan pembangunan sumber, energi, dan lingkungan									111.43	111.43
1a-CP	Indeks Energi	PAJ	PA	80%	108.29	20%	57.69%	108.29	108.29	80.82	
1b-CP	Persentase Realisasi pembangunan negara dan pengelolaan keuangan negara dan lingkungan	PAJ	PA	100%	145.47%	34%	63.47%	145.47	139.93	80.81	
	Customer Perspective (20%)										
2	Pengelolaan keuangan negara dan lingkungan									105.97	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	PAJ	PA	100%	122.80%	20%	26.54%	122.80	122.80	43.88	
2b-CP	Persentase realisasi pada lingkungan	PAJ	PA	100%	84.30%	20%	30.54%	84.30	84.30	55.54	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai aset negara	PAJ	PA	100%	130.24%	34%	26.02%	130.24	122.19	29.88	
3	Pengelolaan keuangan negara dan lingkungan yang memuat indikator pelayanan jasa									109.80	
3a-CP	Indeks efisiensi pelayanan dan kemudahan	PAJ	PA	TU	88.38	34%	50.00%	108.38	108.38	80.00	
3b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	PAJ	PA	77	98.92	34%	50.00%	108.94	108.94	80.00	
	Internal Process Perspective (20%)										
4	Pengelolaan tata kelola aset yang efektif									129.80	
4a-CP	Persentase Bauran PMA Negara tercapai sesuai yang ditetapkan	PAJ	PA	100%	121.87%	34%	50%	121.88	121.88	80.00	
4b-CP	Persentase Realisasi Kinerja BPH (Pembelian Korp)	PAJ	PA	100%	120.80%	34%	50%	120.80	120.80	60.00	
5	Pengelolaan utang negara, pinjaman, dan liabilitas yang profesional dan produktif									114.87	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Bauran Korp Mula Negara	PAJ	PA	100%	110%	14.80%	53.33%	110.00	110.00	36.87	
5b-CP	Tingkat kualitas capaian produksi	PAJ	PA	70%	100.90%	14.80%	53.50%	100.91	100.91	40.00	
5c-CP	Persentase produktivitas utang	PAJ	PA	80%	106.80%	14.80%	53.33%	106.80	106.80	40.00	
	Learning Growth Perspective (20%)										
6	Pengelolaan keuangan dan BPH yang akurat, serta BPH yang efektif									120.00	
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	PAJ	PA	100	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	80.00	
6b-CP	Indeks tata kelola pengelolaan anggaran jasa	PAJ	PA	100	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	80.00	
6c-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	PAJ	PA	80%	98.00%	14.00%	33.33%	100.00	100.00	80.00	
7	Pengelolaan faktor dan indikator yang efektif yang efektif									107.44	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan fiskal	PAJ	PA	100	114.88	14.00%	50.00%	114.88	114.88	57.44	
7b-CP	Indeks pengelolaan sistem informasi publik (SIP)	PAJ	PA	88	110.00	14.00%	50.00%	110.00	110.00	80.00	
8	Pengelolaan dan pengelolaan internal, serta manajemen risiko yang efektif									124.26	
8a-CP	Indeks kualitas manajemen keuangan negara	PAJ	PA	80.00	87.84	14.00%	50.00%	108.00	108.87	54.96	
8b-CP	Tingkat Capaian dan Kerja dalam Keberhasilan Pelaksanaan 2020-2024	PAJ	PA	100	126.33	14.00%	50.00%	126.33	126.33	80.00	

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan *website* MonSAKTI yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang***d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Hak Cipta Karya Seni Terapa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi Anggaran*

Sejak tahun 2021, telah dilaksanakan implementasi secara penuh sentralisasi pengelolaan belanja pegawai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang meliputi pembayaran atas Gaji (beserta tunjangan yang melekat), Gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur, sehingga anggaran untuk belanja pegawai pada Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sudah terpusat.

Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kali revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah pada satuan kerja (satker) di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Revisi anggaran dilakukan sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025 dan dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal KN ND-522/KN.1/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Revisi tersebut menyebabkan adanya perubahan total anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan tersebut berupa penurunan anggaran sebesar Rp1.147.847.000,00 atau 5,20% dari pagu awal TA 2025 sebesar Rp22.088.747.000,00 sehingga total pagu s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.236.594.000,00.

Rincian anggaran awal dan setelah revisi anggaran serta realisasi belanja pada satker di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel B
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025*

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	244.720.000	244.720.000
KPKNL Manado	12.879.429.000	12.879.429.000
KPKNL Gorontalo	2.521.902.000	2.521.902.000
KPKNL Palu	5.724.300.000	5.724.300.000
KPKNL Ternate	2.587.843.000	2.587.843.000

Jumlah Pendapatan	23.958.194.000	23.958.194.000
Belanja		
Belanja Pegawai		
Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0
KPKNL Manado	0	0
KPKNL Gorontalo	0	0
KPKNL Palu	0	0
KPKNL Ternate	0	0
Belanja Barang		
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	2.635.664.000	2.727.850.000
KPKNL Manado	1.901.819.000	2.058.686.000
KPKNL Gorontalo	2.094.433.000	2.130.879.000
KPKNL Palu	2.404.111.000	2.421.592.000
KPKNL Ternate	2.171.773.000	2.235.497.000
Belanja Modal		
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.801.100.000	3.825.100.000
KPKNL Manado	1.648.076.000	2.246.458.000
KPKNL Gorontalo	248.000.000	440.000.000
KPKNL Palu	412.690.000	427.390.000
KPKNL Ternate	4.771.081.000	4.723.142.000
Total Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	11.207.800.000	11.574.504.000
Belanja Modal	10.880.947.000	11.662.090.000
Jumlah Belanja	22.088.747.000	23.236.594.000

lihat pada lampiran hal. 88-102

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp22.890.734.078,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.890.734.078,00 atau sebesar 95,54% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp23.958.194.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi

Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel B.1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	126.346.000	160.876.000	127,33
Pendapatan Jasa Lainnya	0	500.000	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	23.831.848.000	22.649.008.916	95,04
Pendapatan Denda	0	723.386	0
Pendapatan Lain-Lain	0	79.625.776	0
Jumlah Pendapatan	23.958.194.000	22.890.734.078	95,54%

lihat pada lampiran hal. 88-92

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,70% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan beberapa pos pendapatan. Kenaikan signifikan ada pada pos Pendapatan lain-lain dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan berupa Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel B.1.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%

Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Klaim Asuransi BMN	160.876.000	188.518.000	(27.642.000)	(17,18)
Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	7.377.719	(6.877.719)	(1.375,54)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	22.649.008.916	20.657.011.866	1.991.997.050	8,80
Pendapatan Denda	723.386	9.513.514	(8.790.128)	(1.215,14)
Pendapatan Lain-Lain	79.625.776	4.107.298	75.518.478	94,84
Jumlah Pendapatan	22.890.734.078	20.866.528.397	2.024.205.681	8,84

lihat pada lampiran hal. 88-92

Realisasi Belanja
Rp12.854.445.434,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada seluruh satker di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.975.859.439,00 atau sebesar 68,75% dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp23.236.594.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	11.574.504.000	9.713.182.265	83,92%
Belanja Modal	11.662.090.000	6.281.765.484	53,86%

Total Belanja Kotor	23.236.594.000	15.994.947.749	68,84%
Pengembalian Belanja	-	19.088.310	
Jumlah Belanja	23.236.594.000	15.975.859.439	68,75%

lihat pada lampiran hal. 93-101

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2

(dalam rupiah)



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.081.951.503,00 atau sebesar 69,29% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2025 terdapat alokasi belanja modal pada seluruh satker di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebesar Rp11.662.090.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp6.281.765.484,00 (53,86%).
2. Belanja barang mengalami revisi anggaran karena adanya perubahan target dan anggaran sehingga mengakibatkan kenaikan pagu anggaran dari semula Rp11.207.800.000,00 menjadi Rp11.574.504.000,00. Peningkatan realisasi belanja barang untuk mendukung operasional perkantoran, pelayanan, pembinaan, pendampingan, serta pemeliharaan aset sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel B.2.1

Perbandingan Realisasi Belanja

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Barang	9.694.093.955	11.069.862.985	(1.375.769.030)	-14,19%
Belanja Modal	6.281.765.484	11.987.947.957	(5.706.182.473)	-90,84%
Jumlah Belanja	15.975.859.439	23.057.810.942	(7.081.951.503)	-44,33%

lihat pada lampiran hal. 93

Belanja Barang
Rp11.069.862.985,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.694.093.955,00 dan Rp11.069.862.985,00.

Adapun detail realisasi belanja barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.3

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	3.228.567.828	2.920.322.950	308.244.878	9,55
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	66.596.253	91.595.842	(24.999.589)	(37,54)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38.152.881	81.194.400	(43.041.519)	(112,81)
Belanja Honor Operasional Satker	523.360.000	339.800.000	183.560.000	35,07
Belanja Barang Operasional Lainnya	161.028.350	45.932.215	115.096.135	71,48
Belanja Bahan	112.042.219	529.567.342	(417.525.123)	(372,65)
Belanja Honor Output Kegiatan	479.985.000	452.583.000	27.402.000	5,71

Belanja Barang Non Operasional Lainnya	70.855.800	109.626.855	(38.771.055)	(54,72)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.552.550	0	3.552.550	100,00
Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	237.664.142	392.956.681	(155.292.539)	(65,34)
Belanja Langganan Telepon	1.836.856	28.420.819	(26.583.963)	(1.447,25)
Belanja Langganan Air	25.259.594	23.079.800	2.179.794	8,63
Belanja Sewa	120.000.000	145.463.000	(25.463.000)	(21,22)
Belanja Jasa Profesi	11.500.000	58.210.000	(46.710.000)	(406,17)
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.527.210	0	2.527.210	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	882.418.194	933.736.657	(51.318.463)	(5,82)
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	1.232.592.987	1.135.477.505	97.115.482	7,88
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.512.900	0	45.512.900	100,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.615.920	0	11.615.920	100,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.194.217.581	2.976.575.649	(782.358.068)	(35,66)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	263.896.000	331.857.000	(67.961.000)	(25,75)
Jumlah Belanja Kotor	9.713.182.265	11.069.862.985	(1.356.680.720)	(13,97)
Pengembalian Belanja Barang	19.088.310	0	19.088.310	100,00
Jumlah Belanja Barang	9.694.093.955	11.069.862.985	(1.375.769.030)	(14,19)

lihat pada lampiran hal. 93

Belanja Modal
Rp11.987.947.957,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.281.765.484,00 dan Rp11.987.947.957,00.

Perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel B.4

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi			Selisih
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.142.467.941	2.644.347.957	(1.501.880.016,00)	(131,46)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.139.297.543	9.343.600.000	(4.204.302.457,00)	(81,81)
Jumlah Belanja Kotor	6.281.765.484	11.987.947.957	(5.706.182.473,00)	(90,84)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	6.281.765.484	11.987.947.957	(5.706.182.473,00)	(90,84)

lihat pada lampiran hal. 94

*Belanja Modal Peralata
dan Mesin*
Rp1.142.467.941,00

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah sebesar Rp1.142.467.941,00 dan Rp2.644.347.957,00.

Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.1

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	%
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	49.505.650	566.386.993	(1.044,09)
KPKNL Manado	389.813.644	537.591.600	(37,91)
KPKNL Gorontalo	238.762.684	529.611.364	(121,81)
KPKNL Palu	411.937.913	585.069.000	(42,03)
KPKNL Ternate	52.448.050	425.689.000	(711,64)
Jumlah Belanja Kotor	1.142.467.941	2.644.347.957	(131,46)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.142.467.941	2.644.347.957	(131,46)

Tabel B.4.2

*Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	
	Portable Generator Set	16.247.100
	Televisi	4.169.550
	Handphone	2.899.000
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	26.190.000
2	KPKNL Manado	
	Meja Makan	46.252.548
	Lemari Es	11.932.500
	AC Split 0,5 PK	27.106.200
	Tempat Tidur (120 x 200 cm)	32.325.678

	Mesin Cuci	17.316.000
	Sice	65.202.755
	AC Split 1 PK	12.609.600
	Tempat Tidur (160 x 200 cm)	8.123.320
	Wardrobe	5.344.195
	Wardrobe	13.561.504
	Lemari Es	4.639.800
	Alat Penghancur Kertas	9.790.200
	Rak Arsip	44.990.000
	Kursi Kerja	34.714.000
	Disto Meter	2.514.744
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	53.390.600
3	KPKNL Gorontalo	
	AC Portable	6.380.900
	Panel ATS (Pengalih Daya Listrik)	25.530.000
	Vertical Blind	114.050.000
	Pompa Air	3.539.900
	Sice	4.718.460
	Meja Kerja Besi/Metal	0
	Kursi Kerja Besi/Metal	18.935.050
	Meja Rapat	14.108.374
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	51.500.000
4	KPKNL Palu	
	Sice	13.947.913
	Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor	56.000.000
	Kendaraan Roda 4	341.990.000
5	KPKNL Ternate	
	AC Split 1,5 PK	17.000.000
	Camera Digital	25.735.350
	Distance Meter	9.712.700
	Total	1.142.467.941

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp9.343.600.000,00

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah sebesar Rp5.139.297.543,00 dan Rp9.343.600.000,00.

Adapun rincian belanja modal gedung dan bangunan pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.2

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara		
Pembelian Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	0	6.338.760.000
Pembelian Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	0	3.004.840.000
Total	0	9.343.600.000
KPKNL Manado		
Renovasi Rumah Dinas	534.297.543	0
Total	534.297.543	0
KPKNL Ternate		
Pembelian Rumah Negara Golongan II	4,605,000,000	0
Total	4,605,000,000	
Jumlah Belanja Kotor	5.139.297.543	9.343.600.000
Pengembalian Belanja	0	0
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.139.297.543	9.343.600.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp725.393.329,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp725.393.329,00 dan Rp1.050.326.354,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

lihat pada lampiran hal. 78

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.1.1
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

lihat pada lampiran hal. 78

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp19.081.530,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.081.530,00 dan Rp12.782.492,00.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel C.1.2
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	19.081.530	12.782.492
Jumlah	19.081.530	12.782.492

lihat pada lampiran hal. 78

- Kas di Bendahara Penerimaan pada KPKNL Manado sebesar Rp1.946.080,00 merupakan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025.
- Kas di Bendahara Penerimaan pada KPKNL Gorontalo sebesar Rp17.135.450,00 merupakan bea lelang yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025.
- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp387.179.853,00*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp387.179.853,00 dan Rp736.309.832,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.1.3

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	387.179.853	736.309.832
Jumlah	387.179.853	736.309.832

lihat pada lampiran hal. 78

Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

- KPKNL Manado
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 pada KPKNL Manado adalah sebesar Rp253.531.943,00.
- KPKNL Palu
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 pada KPKNL Palu adalah sebesar Rp1.296.450,00.
- KPKNL Gorontalo
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 pada KPKNL Gorontalo adalah sebesar Rp76.615.960,00.
- KPKNL Ternate
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 pada KPKNL Ternate adalah sebesar Rp55.735.500,00.

*Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid)
Rp98.666.667,00*

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp98.666.667,00 dan Rp109.673.333,00.

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa tersebut belum diterima seluruhnya.

*Tabel C.1.4
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pembayaran sewa gudang untuk menyimpan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL Gorontalo	32.000.000	30.000.000
Pembayaran Sewa gedung/ bangunan penyimpanan barang jaminan/ sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Maluku Utara pada KPKNL Ternate	66.666.667	72.173.333
Jumlah	98.666.667	109.673.333

lihat pada lampiran hal. 78

Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) pada KPKNL Gorontalo Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.000.000,00 merupakan sewa gudang untuk menyimpan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) selama satu tahun. Penyewaan gudang tersebut dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo yaitu Pengurusan Piutang Negara. Jangka waktu pelaksanaan sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 12 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Gedung/Bangunan tanggal 11 Oktober 2024.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp116.993.825,00*

C.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp116.993.825,00 dan Rp24.799.290,00.

Tabel C.1.5
Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	116.993.825	24.799.290
Jumlah	116.993.825	24.799.290

lihat pada lampiran hal. 78

Persediaan
Rp103.471.454,00

C.1.6. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp103.471.454,00 dan Rp166.761.407,00.

Persediaan merupakan jenis aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel C.1.6
Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan Barang Konsumsi	103.471.454	166.761.407
Jumlah	103.471.454	166.761.407

lihat pada lampiran hal. 78

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp6.312.500,00 berada dalam kondisi usang dan tidak disajikan dalam Persediaan. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Rp121.479.190.474,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp121.479.190.474,00 dan Rp116.506.175.987,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Akuntansi Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

lihat pada lampiran hal. 78

Tanah

Rp79.409.060.629,00

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp79.409.060.629,00 dan Rp78.006.560.629,00.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

*Tabel C.2.1
Rincian Mutasi Tanah
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	78.006.560.629
Mutasi tambah:	1.402.500.000
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	79.409.060.629
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	79.409.060.629

lihat pada lampiran hal. 104

Peralatan dan Mesin

Rp23.877.552.106,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp23.877.552.106,00 dan Rp22.569.475.905,00.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Tabel C.2.2
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	22.569.475.905
Mutasi tambah:	3.507.483.013
Mutasi kurang:	(2.199.406.812)
Saldo per 31 Desember 2025	23.877.552.106
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(18.273.063.526)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.604.488.580

lihat pada lampiran hal. 104

Tabel C.2.2.1
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	
	Portable Generator Set	16.247.100
	Televisi	4.169.550
	Handphone	2.899.000
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	26.190.000
2	KPKNL Manado	
	Meja Makan	46.252.548
	Lemari Es	11.932.500
	AC Split 0,5 PK	27.106.200
	Tempat Tidur (120 x 200 cm)	32.325.678
	Mesin Cuci	17.316.000
	Sice	65.202.755
	AC Split 1 PK	12.609.600
	Tempat Tidur (160 x 200 cm)	8.123.320
	Wardrobe	5.344.195
	Wardrobe	13.561.504
	Lemari Es	4.639.800
	Alat Penghancur Kertas	9.790.200
	Rak Arsip	44.990.000
	Kursi Kerja	34.714.000
	Disto Meter	2.514.744
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	53.390.600
3	KPKNL Gorontalo	
	AC Portable	6.380.900
	Panel ATS (Pengalih Daya Listrik)	25.530.000
	Vertical Blind	114.050.000
	Pompa Air	3.539.900
	Sice	4.718.460
	Meja Kerja Besi/Metal	0
	Kursi Kerja Besi/Metal	18.935.050
	Meja Rapat	14.108.374
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	51.500.000

4	KPKNL Palu	
	Sice	13.947.913
	Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor	56.000.000
	Kendaraan Roda 4	341.990.000
5	KPKNL Ternate	
	AC Split 1,5 PK	17.000.000
	Camera Digital	25.735.350
	Distance Meter	9.712.700
	Total	1.142.467.941

Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan
Rp42.802.136.699,00*

Saldo gedung dan bangunan di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp42.802.136.699,00 dan Rp39.277.711.947,00.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel C.2.3
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	39.277.711.947
Mutasi tambah:	5.497.297.543
Mutasi kurang:	1.972.872.791
Saldo per 31 Desember 2025	42.802.136.699
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(6.372.885.784)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	36.429.250.915

lihat pada lampiran hal. 107

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp209.936.000,00*

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp209.936.000,00 dan Rp209.936.000,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.4
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	209.936.000
Mutasi tambah:	102.500.000
Mutasi kurang:	102,500,000
Saldo per 31 Desember 2025	209.936.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(178.445.600)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	31.490.400

lihat pada lampiran hal. 108

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp4.899.950,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.899.950,00 dan Rp11.830.950,00. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan seperti buku dan barang bercorak kesenian seperti lukisan.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.5
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	11.830.950
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	6.931.000
Saldo per 31 Desember 2025	4.899.950
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.899.950

lihat pada lampiran hal. 108

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel C.2.6

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	8.502.297.543	8.502.297.543	0
TOTAL					0

lihat pada lampiran hal. 118

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp24.824.394.910,00)*

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp24.824.394.910,00) dan (Rp23.569.339.444,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel C.2.7

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	23.877.552.106	(18.273.063.526)	5.604.488.580
2	Gedung dan Bangunan	42.802.136.699	(6.372.885.784)	36.429.250.915
3	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	209.936.000	(178.445.600)	31.490.400
No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
4	Aset Tetap Lainnya	4.899.950	0	4.899.950
Jumlah		66.894.524.755	(24.824.394.910)	42.070.129.845

lihat pada lampiran hal. 120

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp0,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara terdiri dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00

C.3.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp65.999.999,0.

lihat pada lampiran hal. 78

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp515.145.000,00.

Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional satker lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C.3.2
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	515.145.000
Mutasi tambah:	2.177.714.812
Mutasi kurang:	(2.692.859.812)
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

lihat pada lampiran hal. 108

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0,00*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp515.145.000,00).

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C.3.3

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	0	0	0
2	ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

lihat pada lampiran hal. 124

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp409.947.664,00*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp409.947.664,00 dan Rp786.288.122,00.

lihat pada lampiran hal.78

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp390.935.164,00*

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp390.935.164,00 dan Rp784.898.705,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.1
Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	3.755.311	48.588.873
2	Dana Pihak Ketiga	387.179.853	736.309.832
	Jumlah	390.935.164	784.898.705

lihat pada lampiran hal. 78

*Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp0,00*

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan beban/belanja yang telah dibuat SPBy namun belum di-SP2D-kan sampai dengan tanggal pelaporan.

Tabel C.4.2
Perbandingan Utang Yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0
2	KPKNL Manado	0	0
3	KPKNL Palu	0	0
4	KPKNL Ternate	0	0
	Jumlah	0	0

lihat pada lampiran hal. 78

*Pendapatan Diterima Di Muka
Rp19.012.500,00*

C.4.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.012.500,00 dan Rp1.389.417,00.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB.

Tabel C.4.3
Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	19.012.500	1.389.417
	Jumlah	19.012.500	1.389.417

lihat pada lampiran hal. 78

Sedangkan, Pendapatan Diterima di Muka pada KPKNL Ternate senilai Rp19.012.500,00 merupakan pendapatan atas sewa tanah KPKNL Ternate yang dipergunakan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Ternate dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor SPKS-01/KNL.1604/2023.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.4.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing satker lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.4
Rincian Uang Muka dari KPPN
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0
2	KPKNL Manado	0	0
3	KPKNL Gorontalo	0	0
4	KPKNL Palu	0	0
5	KPKNL Ternate	0	0
	Jumlah	0	0

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

C.4.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00,

Ekuitas**Rp116.770.214.219.00****C.5. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.787.006.159,00 dan Rp116.770.214.219,00.

Tabel C.5

*Perbandingan Ekuitas per Satuan Kerja
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	14.197.430.743	14.155.287.985
2	KPKNL Manado	14.195.137.307	13.326.438.874
3	KPKNL Gorontalo	26.547.925.005	26.805.916.417
4	KPKNL Palu	42.965.413.484	42.766.193.170
5	KPKNL Ternate	23.888.729.600	19.716.377.773
	Jumlah	121.794.636.139	116.770.214.219

lihat pada lampiran hal. 78

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp22.849.020.568,00*

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.849.020.568,00 dan Rp20.702.547.225,00. Pendapatan tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel D.1

*Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	20.668.917	19.115.000	1.553.917	7,52
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	4.126.000	(3.626.000)	(725,20)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	10.157.124.312	8.440.880.165	1.716.244.147	16,90
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	1.502.299.425	598.873.943	903.425.482	60,14
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	11.052.164.202	11.543.434.104	(491.269.902)	(4,45)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	35.914.550	79.245.482	(43.330.932)	(120,65)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	723.386	9.513.514	(8.790.128)	(1215,14)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	0	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	79.625.776	7.359.017	72.266.759	90,76
Jumlah Pendapatan	22.849.020.568	20.702.547.225	2.146.473.343	9,39

Pendapatan akrual pada satker lingkup Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berasal dari pendapatan penjualan, pengelolaan BMN iuran badan usaha, pendapatan jasa lainnya, pendapatan bunga pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan, pendapatan denda, dan pendapatan lain-lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak dan pendapatan anggaran lain-lain.

Beban Persediaan
Rp313.371.015,00

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp313.371.015,00 dan Rp372.879.504,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel D.2
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	313.371.015	372.879.504	(59.508.489)	18,99%
Jumlah Beban	313.371.015	372.879.504	(59.508.489)	18,99%

lihat pada lampiran hal. 84

Beban Barang dan Jasa
Rp4.844.684.087,00

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.844.684.087,00 dan Rp5.256.702.873,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan, terjadi penurunan beban barang dan jasa, hal ini disebabkan pada TA 2025, penggunaan akun belanja barang dan jasa operasional covid-19 sudah tidak dianggarkan. Selain itu, penurunan signifikan ada pada realisasi beban sewa yaitu untuk sewa gedung/bangunan.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel D.3
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.227.897.828	2.920.212.950	307.684.878	9,53
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	66.596.253	91.595.842	(24.999.589)	(37,54)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33.534.381	83.785.900	(50.251.519)	(149,85)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	523.360.000	339.800.000	183.560.000	35,07
Beban Barang Operasional Lainnya	161.028.350	45.932.215	115.096.135	71,48
Beban Bahan	112.042.219	529.567.342	(417.525.123)	(372,65)
Beban Honor Output Kegiatan	479.985.000	452.583.000	27.402.000	5,71
Beban Barang Non Operasional Lainnya	70.855.800	132.543.522	(61.687.722)	(87,06)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.351.550	0	4.352.549	100,00
Beban Langganan Listrik	0	470.517.983	(470.517.983)	0,00
Beban Langganan Telepon	1.845.487	27.772.995	(5.927.508)	(1.404,91)
Beban Langganan Air	25.653.343	22.645.624	3.007.719	11,72
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.527.210	0	2.527.210	100,00
Beban Sewa	123.506.666	81.145.500	42.361.166	34,30
Beban Jasa Profesi	11.500.000	58.210.000	(46.710.000)	(406,17)
Jumlah Beban	4.844.684.087	5.256.312.873	(411.628.786)	(8,50)

lihat pada lampiran hal.82

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.167.591.771,00*

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.167.591.771,00 dan Rp2.061.714.162,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan realisasi beban pemeliharaan terjadi karena kenaikan biaya yang selaras dengan inflasi. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel D.4

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	927.931.094	933.736.657	-5.805.563	-0,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.239.660.677	1.127.977.505	111.683.172	9,01
Jumlah Beban	2.167.591.771	2.061.714.162	105.877.609	4,88

lihat pada lampiran hal. 83

*Beban Perjalanan Dinas
Rp2.439.457.581,00*

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.439.457.581,00 dan Rp3.308.432.649,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai dalam rangka pembinaan maupun kegiatan koordinasi dengan satuan kerja yang lain.

Tabel D.5

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	2.175.561.581	2.976.575.649	(801.014.068)	(36,82)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	263.896.000	331.857.000	(67.961.000)	(25,75)
Jumlah Beban	2.439.457.581	3.308.432.649	(868.975.068)	(35,62)

lihat pada lampiran hal. 83

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi*

Rp2.729.938.029,00

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.729.938.029,00 dan Rp2.705.955.753,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dan adalah sebagai berikut.

Tabel D.6

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.793.666.465	1.846.399.859	(52.733.394)	(2,94)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	913.203.164	838.562.294	74.640.870	8,17
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.993.600	20.993.600	0	0
Beban penyusutan aset tetap yang tidak digunakan	2.074.800	-	-	-
Jumlah Beban	Rp2.729.938.029	2.705.955.753	21.907.476	0,80

lihat pada lampiran hal. 83

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp110.682.950,00*

D.7. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp110.682.950,00 dan Rp184.499.391,00.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebagai berikut.

Tabel D.7
Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	
	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Rp)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	110.682.950	184.499.391	(73.816.441)	(66,69)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Beban	110.682.950	184.499.391	(73.816.441)	(66,69)

lihat pada lampiran hal. 85

Pendapatan dari kegiatan nonoperasional lainnya tersebut berasal dari pendapatan pelepasan aset non lancar berupa penjualan peralatan dan mesin dan pemindahtanganan BMN lainnya.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.8. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

lihat pada lampiran hal. 85

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp116.770.214.219,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 dan 01 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp116.770.214.219,00 dan Rp107.277.527.856,00
lihat pada lampiran hal.86

Surplus/(Defisit)-LO
Rp10.464.661.035,00

E.2. Surplus (Defisit)-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan Pos Luar Biasa. Jumlah ini akan menjadi bagian yang menambah atau mengurangi Ekuitas di Neraca. Jumlah Surplus/Defisit- LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.464.661.035,00 dan Rp7.181.361.675,00. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

lihat pada lampiran hal.86

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi / Kesalahan
Mendasar
Rp0,00

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Koreksi yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp1.431.174,00

E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.431.174,00 dan Rp26.329.643,00.

lihat pada lampiran hal.86

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas nilai persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0,00

E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan transaksi koreksi pencatatan aset berupa reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar terkait akun persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 nilai koreksi atas reklasifikasi adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah selisih yang diakibatkan oleh penilaian kembali aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp1.431.150,00

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.431.150,00 dan Rp26.329.643,00.

lihat pada lampiran hal.86

Koreksi Lain-lain
Rp24,00

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain yang terkait Barang Milik Negara, koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap, dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi Lain-lain misalnya koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp24,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas
(Rp5.441.670.289,00)

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp5.441.670.289,00) dan Rp2.284.995.045,00.

Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut.

Tabel E.5
Perbandingan Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.975.859.439	23.057.810.942
Diterima dari Entitas Lain	(22.890.734.078)	(20.866.528.397)
Transfer Masuk	1.494.279.409	93.712.500
Transfer Keluar	(21.075.059)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	(5.441.670.289)	2.284.995.045

lihat pada lampiran hal. 82

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp22.890.734.078,00) sedangkan DKEL sebesar Rp15.975.859.439,00.

lihat pada lampiran hal. 82

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.494.279.409,00.

Adapun Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah (Rp21.075.059,00).

*Tabel E.5.2
Rincian Transfer Masuk per Satuan Kerja
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No	Transfer Masuk	Nilai
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	405.839.886
2	KPKNL Manado	488.743.557
3	KPKNL Gorontalo	47.175.700
4	KPKNL Palu	504.543.566
5	KPKNL Ternate	47.976.700
	Jumlah	1.494.279.409

*Tabel E.5.3
Rincian Transfer Keluar per Satuan Kerja
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025*

(dalam rupiah)

No	Transfer Keluar	Nilai
1	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	77.034
2	KPKNL Manado	928.920
3	KPKNL Gorontalo	10.568.192
4	KPKNL Palu	(47.813.626)
5	KPKNL Ternate	15.164.421
	Jumlah	21.075.059

*Ekuitas Akhir
Rp121.794.636.139,00*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.794.636.139,00 dan Rp116.770.214.219,00.

lihat pada lampiran hal. 82

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

Pada tahun 2025 terdapat beberapa ketentuan dan peristiwa yang penting untuk diungkapkan yaitu sebagai berikut:

1. Revisi Anggaran

Selama periode Anggaran 2025, terdapat 10 (sepuluh) kali revisi anggaran dan 2 (dua) diantaranya mengakibatkan besaran pagu anggaran berubah pada satuan kerja Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berikut revisi anggaran yang merubah besaran pagu anggaran:

- a. Revisi anggaran dilakukan sehubungan dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025 dan dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal KN ND-522/KN.1/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu terdapat penyesuaian revisi efisiensi blokir pagu anggaran yang menyebabkan dari jumlah pagu awal sebesar Rp6.436.764.000,00 terblokir sebesar Rp4.633.912.000,00 yang terdiri dari blokir belanja modal sebesar Rp3.801.100.000,00 dan belanja barang sebesar Rp832.812.000,00.
- b. Revisi kedua dilakukan sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal KN ND-3015/KN.1/2025 tanggal 24 September 2025, hal Penyampaian Langkah dan Timeline Revisi Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan DJKN, yang menyebabkan penambahan pagu sebesar Rp234.607.000,00 yang semua besaran pagu total Rp6.317.343.000,00 menjadi Rp6.551.950.000,00.

lihat pada lampiran hal. 837-1154

2. Perubahan PPSPM dan PPK

- **Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara**

Pada bulan November 2024, terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Nomor KEP-80/WKN.16/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Pengelola Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, yaitu:

Semula

Kuasa Pengguna Anggaran	: Indriasari Sundoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Dliyaul Umam
Pejabat Penandatangan SPM	: Rizar Anugraha
Bendahara Pengeluaran	: Oldrey Elfianus Gasah
Staf Kegiatan/Staf PPK	: Antonius Victor
Staf Kegiatan/Staf PPK	: Elma Nawawulan

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran	: Indriasari Sundoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Dliyaul Umam
Pejabat Penandatangan SPM	: Rizar Anugraha
Bendahara Pengeluaran	: Hamzah Iskandar
Staf Kegiatan/Staf PPK	: Heru Juliwiyanto
Staf Kegiatan/Staf PPK	: Rinaldo Alexandro Palit
Staf Kegiatan/Staf PPK	: Oldrey Elfianus Gasah

• **KPKNL Gorontalo**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo Nomor KEP-61/KNL.1602/2025 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo Nomor KEP-17/KNL.1602/2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada KPKNL Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu:

Semula

Kuasa Pengguna Anggaran	: Iwan Darma Setiawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: Wegig Nurdiansyah
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Imam Rosadi
Bendahara Pengeluaran	: Nabila Fairuza Purwanti
Bendahara Penerimaan	: Adry Dharmawan Tambengi

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran	: Purwito
Pejabat Pembuat Komitmen	: Wegig Nurdiansyah
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Dwi Ratna
Bendahara Pengeluaran	: Nabila Fairuza Purwanti
Bendahara Penerimaan	: Adry Dharmawan Tambengi

3. Capaian Rincian Output

Capaian Rincian Output satuan kerja lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara				
No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
1	015.09.CD.4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	125 orang	100%	527 orang
2	015.09.CD.4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	52 orang	100%	52 orang
3	015.09.CD.4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	25 orang	100%	25 orang
4	015.09.CD.4797.FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 rekomendasi	100%	2 rekomendasi
5	015.09.CD.4797.FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi
6	015.09.CD.4797.FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	9 rekomendasi	100%	9 rekomendasi
7	015.09.CD.4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	2 surat keputusan	100%	7 surat keputusan
8	015.09.CD.4798.FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	37 orang	100%	37 orang
9	015.09.CD.4798.FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1 orang	100%	4 orang
10	015.09.CD.4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3 rekomendasi	100%	4 rekomendasi
11	015.09.CD.4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	100%	3 rekomendasi
12	015.09.CD.4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	2 rekomendasi	100%	2 rekomendasi
13	015.09.CD.4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	3 aset	100%	8 aset

No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
14	015.09.CD.4801.ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	2 orang	100%	2 orang
15	015.09.WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	3 layanan	100%	3 layanan
16	015.09.WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	12 layanan	100%	12 layanan
17	015.09.WA.4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 layanan	100%	12 layanan
18	015.09.WA.4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	3 unit	100%	3 unit
19	015.09.WA.4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	1 unit	100%	1 unit
20	015.09.WA.4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	250 m2	100%	250 m2
21	015.09.WA.4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	25 orang	100%	25 orang
22	015.09.WA.4702.BMB.002 Kehumasan	24 kegiatan	100%	24 kegiatan
23	015.09.WA.4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 dokumen	100%	5 dokumen

KPKNL Manado				
No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
1	015.09.CD.4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	80 orang	100%	80 orang
2	015.09.CD.4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	40 orang	16%	0 orang
3	015.09.CD.4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	40 orang	100%	60 orang
4	015.09.CD.4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	175 surat keputusan	100%	532 surat keputusan
5	015.09.CD.4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	100 surat keputusan	100%	308 surat keputusan
6	015.09.CD.4798.ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	821 rekomendasi kebijakan	100%	986 rekomendasi kebijakan

No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
7	015.09.CD.4798.BAH.001 Risalah Lelang	400 dokumen	100%	1.167 dokumen
8	015.09.CD.4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi
9	015.09.CD.4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	100%	4 rekomendasi
10	015.09.CD.4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	1 rekomendasi	86%	0 rekomendasi
11	015.09.CD.4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PU)	130 rekomendasi	100%	454 rekomendasi
12	015.09.CD.4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	12 aset	100%	20 aset
13	015.09.CD.4798.UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PN)	276 rekomendasi	100%	687 rekomendasi
14	015.09.WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	10 layanan	100%	14 layanan
15	015.09.WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	12 layanan	100%	12 layanan
16	015.09.WA.4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 layanan	100%	12 layanan
17	015.09.WA.4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	75 unit	100%	75 unit
18	015.09.WA.4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	2 unit	100%	2 unit
19	015.09.WA.4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	332,5 m2	100%	332,5 m2
20	015.09.WA.4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	100 orang	100%	140 orang
21	015.09.WA.4702.BMB.002 Kehumasan	21 kegiatan	100%	26 kegiatan
22	015.09.WA.4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 dokumen	100%	32 dokumen

KPKNL Gorontalo				
No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
1	015.09.CD.4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	170 orang	100%	241 orang
2	015.09.CD.4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	55 orang	100%	72 orang
3	015.09.CD.4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	10 orang	100%	10 orang

No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
4	015.09.CD.4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	125 surat keputusan	100%	331 surat keputusan
5	015.09.CD.4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	3 surat keputusan	100%	3 surat keputusan
6	015.09.CD.4798.ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	251 rekomendasi kebijakan	100%	306 rekomendasi kebijakan
7	015.09.CD.4798.BAH.001 Risalah Lelang	375 dokumen	100%	538 dokumen
8	015.09.CD.4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 rekomendasi	100%	3 rekomendasi
9	015.09.CD.4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	100%	2 rekomendasi
10	015.09.CD.4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi
11	015.09.CD.4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	193 rekomendasi	100%	309 rekomendasi
12	015.09.WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	4 layanan	100%	4 layanan
13	015.09.WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	12 layanan	100%	12 layanan
14	015.09.WA.4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 layanan	100%	12 layanan
15	015.09.WA.4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	27 unit	100%	27 unit
16	015.09.WA.4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	2 unit	100%	2 unit
17	015.09.WA.4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	100 orang	100%	100 orang
18	015.09.WA.4702.BMB.002 Kehumasan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
19	015.09.WA.4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan	5 dokumen	100%	12 dokumen

KPKNL Palu				
No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
1	015.09.CD.4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	20 orang	100%	40 orang
2	015.09.CD.4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	20 orang	100%	115 orang

No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
3	015.09.CD.4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	10 orang	100%	11 orang
4	015.09.CD.4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan	230 surat keputusan	100%	682 surat keputusan
5	015.09.CD.4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	11 surat keputusan	100%	11 surat keputusan
6	015.09.CD.4798.ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	656 rekomendasi kebijakan	100%	769 rekomendasi kebijakan
7	015.09.CD.4798.BAH.001 Risalah Lelang	350 dokumen	100%	1.057 dokumen
8	015.09.CD.4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	100%	57 rekomendasi
9	015.09.CD.4798.FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	2 rekomendasi	100%	6 rekomendasi
10	015.09.CD.4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	91 rekomendasi	100%	4 rekomendasi
11	015.09.CD.4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	4 aset	100%	4 aset
12	015.09.CD.4798.UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	291 rekomendasi	100%	474 rekomendasi
13	015.09.WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	9 layanan	100%	35 layanan
14	015.09.WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	12 layanan	100%	12 layanan
15	015.09.WA.4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 layanan	100%	12 layanan
16	015.09.WA.4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas	1 unit	100%	1 unit
17	015.09.WA.4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	3 unit	100%	3 unit
18	015.09.WA.4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	30 orang	100%	50 orang
19	015.09.WA.4702.BMB.002 Kehumasan	24 kegiatan	100%	34 kegiatan
20	015.09.WA.4702.BMB.002 Pameran/Eksibisi	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
21	015.09.WA.4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan	5 dokumen	100%	7 dokumen

KPKNL Ternate				
No	Rincian Output	Target	PCRO	RVRO
1	015.09.CD.4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3 orang	100%	3 orang
2	015.09.CD.4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	2 orang	100%	3 orang
3	015.09.CD.4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1 orang	100%	1 orang
4	015.09.CD.4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	60 surat keputusan	100%	60 surat keputusan
5	015.09.CD.4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	4 surat keputusan	100%	8 surat keputusan
6	015.09.CD.4798.ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	294 rekomendasi kebijakan	100%	294 rekomendasi kebijakan
9	015.09.CD.4798.BAH.001 Risalah Lelang	100 dokumen	100%	180 dokumen
10	015.09.CD.4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi
11	015.09.CD.4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	100%	2 rekomendasi
12	015.09.CD.4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi
13	015.09.CD.4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PU)	110 rekomendasi	100%	110 rekomendasi
14	015.09.WA.4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	3 layanan	100%	3 layanan
15	015.09.WA.4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	12 layanan	100%	12 layanan
16	015.09.WA.4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 layanan	100%	12 layanan
17	015.09.WA.4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	5 unit	100%	5 unit
17	015.09.WA.4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	320 M ²	100%	320 M ²
18	015.09.WA.4702.BMB.002 Kehumasan	4 kegiatan	100%	10 kegiatan
19	015.09.WA.4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 dokumen	100%	5 dokumen



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN

BENTENAN

BERSIH - ENERGIK - TEPERCAYA - AKUNTABEL

**KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO DAN MALUKU UTARA**

**Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Manado
Jalan Bethesda No. 6-8 Kota Manado**



@djkn.suluttenggomalut